

ABSTRAK

Dzikri Muhammad Syamsani (2022) : Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 Tentang pajak penghasilan Atas hadiah Undian Dihadirkan Dengan Asas Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Bidang Perpajakan.

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan dari pemenang hadiah undian yang menurut data awal bahwa kebanyakan orang yang mendapatkan hadiah undian merasa tidak adil dengan adanya pemotongan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen), tetapi fakta hukum menjelaskan bahwa 25% dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dalam hal lain pemerataan untuk orang yang tidak mendapatkan hadiah undian agar tetap merasakan manfaatnya karena seyogyanya pajak merupakan pendapatan negara yang hasilnya itu dialokasikan sebagai pembiayaan pembangunan nasional di semua bidang dan fasilitas umum.

Tujuan Penelitian, pertama untuk menemukan suatu konsep pengenaan tarif pajak penghasilan atas hadiah undian yang diatur berdasarkan PP No 132 Tahun 2000, bila dihubungkan dengan asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan. Kedua, untuk menghasilkan suatu konsep mengenai pengenaan tarif pajak penghasilan sebesar 25% yang bersifat final, bila dihubungkan dengan asas keadilan Wajib pajak.

Teori yang digunakan Pertama, teori Negara hukum, kedua, teori kepastian hukum bidang perpajakan dan ketiga teori keadilan. Semua teori ini akan digunakan untuk mengukur sejauh mana asas kepastian dan keadilan hukum untuk pajak undian berhadiah. Juga ditambah dengan teori hukum pajak, teori pengenaan tarif pajak dan teori objek pajak berdasarkan PP No. 132 Tahun 2000.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang diawali dengan menginventarisasi hukum positif sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan norma hukum dan asas hukum yang berlaku dan yang relevan. Untuk melengkapi data sekunder ditambahkan pula dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, asas kepastian hukum dan keadilan dalam Pasal 2 PP No 132 Tahun 2000 yaitu tidak tepat atau tidak memiliki kepastian hukum, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan Pasal 23 A amandemen ketiga, bahwa pajak harus diatur dengan UU. Kedua, Pengenaan tarif pajak penghasilan atas hadiah undian sebesar 25% yang bersifat final, bila dihubungkan dengan asas keadilan wajib pajak adalah termasuk perlakuan perpajakan yang dapat sangat merugikan Wajib pajak lebih tepatnya yaitu selain potongannya sangat besar juga kehilangan hak untuk mengajukan keberatan bagi Wajib Pajak.